

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN BANGLI

I Kadek Dede Junaedy, Ni Luh Putu Ening Permini, I Wayan Arya Sugiarta, I Made  
Artayasa, Ni Kadek Ariati, Ni Putu Manik Puryantini

<sup>123456</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai,

Email : [dedejunaedy55@gmail.com](mailto:dedejunaedy55@gmail.com); [ening.permini@unr.ac.id](mailto:ening.permini@unr.ac.id); [iwayanarya1990@gmail.com](mailto:iwayanarya1990@gmail.com)  
[artayasa\\_bali@yahoo.com](mailto:artayasa_bali@yahoo.com); [kadekariati@gmail.com](mailto:kadekariati@gmail.com); [manikpuryantini@gmail.com](mailto:manikpuryantini@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.30742/juispol.v6i1.5117>

---

Received: 2 Februari 2026	Revised: 18 Februari 2026	Accepted: 20 Maret 2026
---------------------------	---------------------------	-------------------------

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bangli. Wilayah ini dipilih karena memiliki karakteristik geografis pegunungan dengan aksesibilitas terbatas serta struktur sosial ekonomi yang masih didominasi pertanian subsisten, sehingga rentan terhadap gangguan pasokan pangan akibat faktor alam maupun dinamika pasar. Kondisi tersebut menuntut kebijakan cadangan pangan yang adaptif, responsif, dan sesuai konteks lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan, hambatan, serta strategi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Analisis menggunakan kerangka George C. Edwards III yang menekankan pentingnya komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai determinan keberhasilan implementasi. Kerangka ini diperkaya dengan perspektif Mazmanian dan Sabatier untuk memahami keterkaitan antara desain kebijakan, kondisi sosial-politik, serta kapasitas pelaksana. Penelitian diharapkan menghasilkan gambaran empiris implementasi kebijakan di Bangli sekaligus kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan tata kelola cadangan pangan. Temuan studi ini diharapkan menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif, partisipatif, dan berbasis bukti, serta dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik serupa.

**Kata kunci:** Implementasi\_kebijakan; cadangan\_pangan; ketahanan\_pangan; kebijakan\_publik;

## Abstract

This study aims to provide an in-depth analysis of the implementation of food reserve management policies as part of efforts to achieve sustainable food security in Bangli Regency. This region was selected due to its mountainous geography with limited accessibility and a socioeconomic structure still dominated by subsistence agriculture, making it vulnerable to food supply disruptions due to natural factors and market dynamics. These conditions demand food reserve policies that are adaptive, responsive, and tailored to the local context. The study used a qualitative approach with a case study method to explore the role of local government, institutional capacity, obstacles, and strategies for implementing Bangli Regency Regulation Number 11 of 2022 concerning Food Reserve Management Procedures. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy

documents. The analysis utilized George C. Edwards III's framework, which emphasizes the importance of policy communication, resource availability, implementer disposition, and bureaucratic structure as determinants of implementation success. This framework is enriched with the perspectives of Mazmanian and Sabatier to understand the interrelationships between policy design, socio-political conditions, and implementer capacity. The research is expected to produce an empirical overview of policy implementation in Bangli, as well as theoretical and practical contributions to strengthening food reserve governance. The findings of this study are expected to serve as a reference for formulating more effective, participatory, and evidence-based policies, and can be replicated in other regions with similar characteristics.

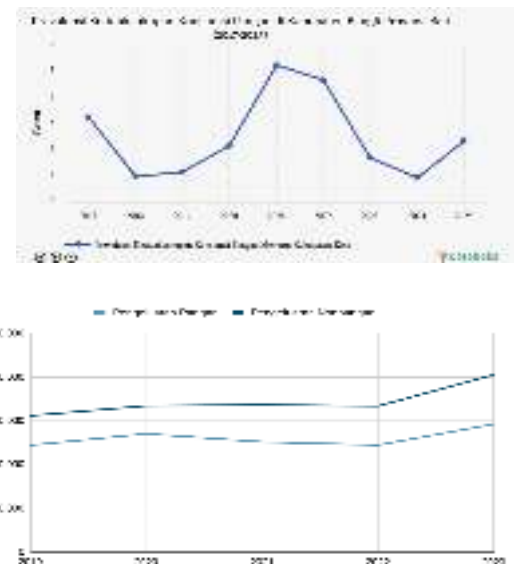
Keywords: policy\_implementation; food\_reserves; food\_security; public\_policy;

## 1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan menjadi isu strategi dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan alih fungsi lahan dan pertumbuhan penduduk. Alih fungsi lahan pertanian telah mengurangi ketersediaan lahan produktif untuk pertanian, yang berdampak langsung pada produksi pangan nasional. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bulan November 2020 menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 100.000-150.000 hektar lahan sawah di Indonesia yang mengalami alih fungsi lahan. Fenomena ini menurunkan kapasitas produksi pangan nasional dan berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap impor bahan pangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap pangan meningkat sementara luas lahan pertanian yang tersedia semakin berkurang. Hal ini menimbulkan risiko kelangkaan pangan yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi di Provinsi Bali, yang mengalami alih fungsi lahan pertanian dalam skala signifikan. Salah satu indikator yang menunjukkan ketimpangan antara kebutuhan dan produksi pangan adalah tren pengeluaran rumah tangga terhadap konsumsi pangan. Kebutuhan dengan produksi pangan di

Provinsi Bali ditunjukkan pada grafik rata-rata pengeluaran masyarakat dalam di Bali Tahun 2019-2023:



Gambar 1. Grafik Rata-Rata Pengeluaran Sebulan di Bali Tahun 2019-2023

Berdasarkan grafik rata-rata pengeluaran sebulan di Bali Tahun 2019-2023 rata-rata pengeluaran masyarakat digunakan untuk pembelian makanan terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran masyarakat Bali untuk pembelian makanan mencapai Rp. 729.755, sedangkan untuk non-makanan sebesar Rp. 1.011.768. Tren ini mencerminkan bahwa masyarakat Bali lebih banyak mengalokasikan pengeluaran

mereka untuk kebutuhan pangan dibandingkan dengan non-pangan.

Kabupaten Bangli, sebagai salah satu daerah agraris di Bali, juga menghadapi tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Alih fungsi lahan di daerah ini mengurangi kapasitas produksi pertanian, sementara kebutuhan pangan meningkat. Pengelolaan terhadap pangan di Kabupaten Bangli telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan cadangan pangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan daerah untuk mengatasi terjadinya rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- b. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Namun, saat ini Kabupaten Bangli mengalami permasalahan dalam penyediaan cadangan pangan, yaitu ketersediaan beras. Setiap tahunnya Kabupaten Bangli mengalami kekurangan beras karena luas sawah di Kabupaten Bangli sangat sempit sekitar 5,24% dari luas wilayah Kabupaten Bangli.

## 2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang di atas adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli?
- 2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli?

Dalam studi administrasi publik, salah satu tantangan mendasar yang sering dihadapi bukan terletak pada perumusan kebijakan, melainkan pada tahapan implementasinya.

Implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antarpemangku kepentingan, struktur kelembagaan, serta kondisi sosial-politik yang dinamis. Banyak kebijakan publik yang secara normatif dirancang dengan baik, namun gagal mencapai tujuan yang diharapkan karena proses implementasi yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan memiliki signifikansi teoritis dan praktis yang sangat penting, terutama dalam sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan.

Dalam konteks Kabupaten Bangli, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan yang adaptif dan berbasis lokal. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi tantangan mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerangka teoretis yang dapat menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

Dalam studi kebijakan publik, implementasi menjadi tahap krusial yang menentukan apakah suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya atau justru mengalami kegagalan dalam praktik. Sebuah kebijakan yang telah dirancang dengan baik secara substantif tidak serta-

merta menjamin tercapainya hasil yang diharapkan apabila proses implementasinya tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan menjadi penting, khususnya dalam konteks daerah seperti Kabupaten Bangli yang memiliki karakteristik geografis dan sosial tertentu serta tantangan yang kompleks dalam menjaga ketahanan pangan.

Penelitian ini mengadopsi perspektif dari teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Mazmanian & Sabatier, dua pendekatan teoretik yang paling banyak digunakan dalam studi kebijakan publik. George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana (*attitude*), dan struktur birokrasi.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan memiliki urgensi tinggi dalam rangka memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data serta solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Bangli.

Pendekatan dan strategi pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, di mana terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi: Kejelasan dan konsistensi informasi antara pembuatan kebijakan dan pelaksana sangat penting. Jika komunikasi tidak efektif, maka pelaksana kebijakan bisa menyimpang dari tujuan awal. Jika informasi mengenai kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, maka implementasi dapat mengalami

distorsi atau bahkan penyimpangan dari tujuan awalnya. Dalam konteks Kabupaten Bangli, komunikasi kebijakan antara pemerintah daerah, dinas terkait, hingga tingkat desa sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan cadangan pangan.

2. Sumber Daya: Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, peralatan, dan dukungan politik. Kurangnya sumber daya dapat menghambat keberhasilan kebijakan.
3. Disposisi atau sikap pelaksana: Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan sangat memengaruhi implementasi. Jika Pelaksana tidak memiliki komitmen atau tidak memahami kebijakan, maka implementasi bisa gagal.
4. Struktur Birokrasi: Mekanisme kerja birokrasi harus mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Regulasi yang terlalu kaku atau kompleks bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.
5. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain:
  - a. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia (Studi Kasus Provinsi Bali). Penelitian ini menemukan bahwa dampak pembangunan infrastruktur menjadi sangat berkaitan dengan kondisi ketahanan suatu wilayah
  - b. Analisis Distribusi Pasar dan Margin Pemasaran Gabah-Beras dalam Ketahanan Pangan di Bali. Hasil penelitian ditemukan 2 aliran distribusi pemasaran Gabah/Beras di Provinsi Bali.
  - c. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Bali Tahun 2020. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

Kabupaten Tabanan dan Gianyar merupakan sentra beras di Bali.

Selain teori Edwards III, penelitian ini juga memperkuat analisisnya melalui pendekatan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) yang memberikan penekanan pada tiga elemen utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan serta ketepatan teoretik dalam pendekatan yang digunakan,
2. Kemampuan struktural dan lembaga pelaksana, termasuk koordinasi antar instansi serta keterlibatan pemangku kepentingan, dan
3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier melihat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh faktor internal kebijakan, tetapi juga sangat tergantung pada lingkungan eksternal, termasuk stabilitas politik, dukungan masyarakat, serta tekanan dari kelompok kepentingan. Dalam konteks Kabupaten Bangli yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan pegunungan dan bergantung pada pertanian subsisten, faktor eksternal seperti keterbatasan infrastruktur, pola konsumsi masyarakat, dan keterbatasan akses terhadap pasar juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pangan.

Kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan. Edwards III menekankan pada dinamika internal implementasi kebijakan yang bersifat teknokratis dan operasional, sedangkan Mazmanian dan Sabatier memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana interaksi antara substansi kebijakan, pelaksanaan, dan konteks sosial-politik dapat memengaruhi jalannya kebijakan. Dengan

menggabungkan kedua kerangka ini, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi hambatan struktural dan administratif, tetapi juga menyelidiki dinamika sosial dan politik lokal yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Bangli.

Penerapan teori implementasi ini menjadi sangat relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya terkait sejauh mana kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dapat diimplementasikan secara efektif dan apa saja faktor penghambat dan pendukungnya. Selain itu, analisis berbasis teori ini juga akan memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya penyesuaian kebijakan nasional dengan kondisi lokal yang khas, serta mendorong inovasi kebijakan yang lebih adaptif dan partisipatif di bidang ketahanan pangan.

Dengan demikian, pendekatan teoretis ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengkaji implementasi kebijakan cadangan pangan secara lebih sistematis, komprehensif, dan kontekstual. Pendekatan ini juga mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional dan realistis berdasarkan dinamika lapangan.

Studi tentang ketahanan pangan telah dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk peran kelembagaan dalam kebijakan pangan, dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, serta strategi peningkatan ketahanan pangan melalui inovasi teknologi dan regulasi. Namun, penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan ketahanan pangan di daerah pegunungan seperti Kabupaten Bangli masih terbatas. Kebaruan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk memahami efektivitas kebijakan ketahanan pangan secara mendalam.

2. Analisis implementasi kebijakan berbasis pemangku kepentingan, yang mencakup peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung ketahanan pangan.
3. Identifikasi tantangan spesifik daerah pegunungan dalam pengelolaan ketahanan pangan serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris.

### 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Fokus penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial dan dinamika kebijakan yang terjadi di Kabupaten Bangli.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, petani, dan pelaku usaha pangan serta observasi lapangan untuk memahami bagaimana kebijakan diimplementasikan secara nyata. Data Sekunder melakukan analisis dokumen kebijakan, seperti Peraturan Bupati Bangli, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan laporan statistik ketahanan pangan dari BPS Kabupaten Bangli. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data

penelitian, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data, data dianalisis menggunakan metode analisis tematik berdasarkan teori Mazmanian & Sabatier (1983) tentang implementasi kebijakan. Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah:

1. Reduksi Data: memilah dan menyusun data sesuai dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi: mengelompokkan data berdasarkan faktor implementasi kebijakan (desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan kondisi sosial-politik).

Interpretasi: menganalisis hubungan antar faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Bangli. .

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Implementasi Kebijakan Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangli

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangli serta telaah terhadap dokumen sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), keempat faktor tersebut memiliki peranan yang saling berkaitan dalam menentukan sejauh mana kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

##### 4.1.1 Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli memiliki peranan yang sangat strategis dalam memastikan

kebijakan tersebut dapat dipahami, diterima, dan dijalankan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangli, serta telaah terhadap dokumen sosialisasi dan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), dapat dikatakan bahwa proses komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik, sistematis, dan relatif efektif. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan sosialisasi yang terencana dan terkoordinasi secara menyeluruh kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari instansi pelaksana di tingkat kabupaten hingga aparat desa dan kelompok masyarakat penerima manfaat.

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa seluruh pihak memahami substansi kebijakan yang diatur di dalamnya. Proses penyampaian informasi mencakup tujuan kebijakan, mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan, tata cara distribusi bantuan, serta kriteria penerima manfaat. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media komunikasi, seperti pertemuan tatap muka, rapat koordinasi, surat edaran, hingga pemanfaatan media sosial resmi pemerintah daerah. Kejelasan dan konsistensi informasi menjadi aspek penting karena dapat mencegah munculnya kesalahpahaman di tingkat pelaksana maupun penerima manfaat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) bukan semata-mata bentuk bantuan sosial, melainkan instrumen strategis dalam menjamin ketahanan pangan daerah, terutama pada saat terjadi keadaan darurat, bencana, atau gangguan distribusi pangan.

Mekanisme koordinasi lintas sektor yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli memperlihatkan praktik komunikasi kebijakan yang bersifat horizontal dan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan berperan sebagai *leading sector* yang mengoordinasikan berbagai instansi terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, Bappeda, Kodim, dan Polres. Kolaborasi lintas sektor ini diwujudkan melalui serangkaian rapat koordinasi rutin yang dilaksanakan pada setiap tahapan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan cadangan pangan, verifikasi calon penerima bantuan, hingga pelaksanaan penyaluran cadangan pangan kepada masyarakat. Pola komunikasi ini bersifat dua arah dan partisipatif, di mana setiap instansi diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kendala, serta rekomendasi perbaikan dalam proses implementasi kebijakan. Pendekatan komunikasi yang inklusif ini tidak hanya memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) antar lembaga terhadap keberhasilan program Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di tingkat daerah.

Selain komunikasi antarlembaga, pola komunikasi vertikal antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat juga berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Bangli secara berkala menyampaikan laporan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui mekanisme pelaporan resmi, baik dalam bentuk dokumen administratif maupun sistem informasi pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berskala makro, yang mendukung keterpaduan data dan kebijakan pangan nasional. Keterbukaan informasi dan pelaporan yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga akuntabilitas

implementasi kebijakan serta memastikan bahwa penyelenggaraan cadangan pangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan efektivitas pemerintahan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan dalam penyebaran informasi yang merata hingga ke tingkat masyarakat paling bawah, terutama di wilayah pedesaan dengan akses komunikasi yang terbatas. Beberapa aparat desa menyampaikan bahwa penyampaian informasi terkadang masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya disertai dengan forum dialog yang interaktif, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, dokumentasi hasil rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat agar setiap pelaksana memiliki acuan tertulis yang sama dalam melaksanakan tugasnya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan komunikasi teknis dari sebagian aparatur pelaksana yang belum mendapatkan pelatihan secara menyeluruh tentang mekanisme penyampaian informasi publik. Untuk itu, diperlukan penguatan strategi komunikasi kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Bangli. Pemerintah daerah dapat mengembangkan model komunikasi berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok tani, dan lembaga adat dalam penyebaran informasi terkait cadangan pangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyebaran informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem informasi pangan daerah dan media sosial dapat dimaksimalkan untuk memperluas jangkauan komunikasi serta

mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) secara cepat dan akurat.

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli dapat dikategorikan efektif. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli dikategorikan efektif apabila informasi kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pelaksana serta kelompok sasaran. Kejelasan tersebut tercermin dari tersedianya pedoman teknis dan standar operasional prosedur yang mampu meminimalkan multiinterpretasi dalam pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan distribusi cadangan pangan.

Konsistensi pesan antarlevel birokrasi, didukung intensitas koordinasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, memperkuat keseragaman tindakan pelaksana. Ketepatan sasaran informasi, akurasi data pangan, serta keberadaan mekanisme umpan balik menunjukkan komunikasi berlangsung dua arah. Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap prosedur menjadi indikator akhir bahwa proses komunikasi telah berjalan efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

Namun masih memerlukan penguatan pada aspek partisipasi publik, pemerataan informasi, dan pengelolaan dokumentasi komunikasi antarinstansi. Komunikasi yang baik tidak hanya sebatas penyampaian pesan kebijakan, tetapi juga melibatkan proses interaksi, umpan balik, dan kolaborasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan. Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III, komunikasi yang jelas, konsisten, dan akurat merupakan prasyarat utama dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli, efektivitas komunikasi

tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pangan daerah yang tangguh, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### 4.1.2 Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu elemen krusial dalam model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, karena ketersediaan dan kualitas sumber daya secara langsung memengaruhi efektivitas serta keberlanjutan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks implementasi kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bangli, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara umum berada dalam kondisi yang memadai untuk mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Ketiga komponen ini berfungsi secara sinergis dalam memastikan kegiatan penyimpanan, pengelolaan, dan pendistribusian cadangan pangan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan kebijakan CPPD di Kabupaten Bangli didukung oleh aparatur pelaksana yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terlibat dalam program ini telah memiliki pengalaman dalam manajemen logistik pangan serta pemahaman yang baik terhadap regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022. Selain itu, aparat desa dan kelompok tani turut berperan aktif dalam tahapan pelaksanaan, khususnya dalam pendistribusian cadangan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Kolaborasi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *governance* yang partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan tidak hanya sebagai penerima kebijakan,

tetapi juga sebagai aktor pelaksana di tingkat lokal. Partisipasi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program CPPD.

Sementara itu, dari aspek anggaran, Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan daerah. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, alokasi anggaran tahun 2024 mencakup penyediaan cadangan pangan sebesar 1 ton beras, sedangkan pada tahun 2025 terdapat penambahan sebesar 296,35 kilogram yang menunggu pengesahan dalam anggaran perubahan. Alokasi ini menunjukkan adanya komitmen fiskal pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan di wilayahnya, meskipun jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan potensi kebutuhan darurat pangan di daerah dengan karakteristik geografis pegunungan seperti Bangli. Kendati demikian, mekanisme penganggaran yang adaptif melalui skema perubahan APBD menunjukkan adanya fleksibilitas kebijakan dalam menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal, di mana penggunaan anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan cadangan pangan. Kabupaten Bangli telah memiliki infrastruktur penyimpanan yang relatif memadai, seperti gudang penyimpanan pangan yang dilengkapi dengan sistem ventilasi dan keamanan yang baik untuk menjaga kualitas beras dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas logistik yang tersedia juga mendukung proses distribusi ke wilayah desa-desa yang tersebar di daerah perbukitan. Mengingat topografi

Kabupaten Bangli yang didominasi oleh kawasan pegunungan dan dataran tinggi, sistem distribusi melalui kantor desa terbukti efektif dalam mengatasi kendala geografis. Pendekatan desentralisasi distribusi ini memudahkan proses penyaluran pangan secara cepat dan merata, khususnya dalam kondisi darurat seperti bencana alam atau gangguan pasokan pangan.

Selain sarana fisik, dukungan teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan dalam mendukung manajemen data dan pelaporan kegiatan CPPD. Sistem administrasi berbasis digital yang diterapkan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membantu mempercepat proses pencatatan stok, pemantauan distribusi, serta penyusunan laporan akuntabilitas publik. Penggunaan sistem informasi ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pada penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, termasuk dalam sektor ketahanan pangan.

Meskipun secara umum sumber daya di Kabupaten Bangli dinilai memadai, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan implementasi ke depan. Pertama, kompetensi teknis aparatur desa dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan logistik pangan masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu menangani dinamika kebutuhan pangan secara profesional. Kedua, jumlah cadangan pangan yang tersedia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi risiko bencana dan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah yang luas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada peningkatan volume cadangan pangan daerah sesuai dengan proyeksi kebutuhan. Ketiga, perlu adanya optimalisasi

pemanfaatan sarana penyimpanan melalui sistem rotasi stok (*stock rotation system*) untuk menjaga kualitas dan ketahanan pangan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli dapat dikategorikan cukup kuat dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program CPPD. Ketersediaan aparatur yang kompeten, dukungan anggaran yang memadai, serta sarana logistik yang efektif menjadi pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kebijakan ini. Dengan terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan anggaran daerah, serta meningkatkan efisiensi sarana penyimpanan dan distribusi, kebijakan CPPD di Kabupaten Bangli diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan masa depan.

#### **4.1.3 Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)**

Faktor disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting dalam model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Faktor ini menitikberatkan pada sejauh mana komitmen, motivasi, serta kesediaan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bangli, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan berada pada tingkat yang sangat baik. Hal ini tercermin dari dedikasi yang tinggi, rasa tanggung jawab, serta kesadaran moral aparatur terhadap pentingnya cadangan pangan sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan melindungi masyarakat dari kerentanan pangan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya.

Aparatur pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun desa, menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai substansi dan tujuan kebijakan CPPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Pemahaman ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata di lapangan. Pelaksana kebijakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, misalnya, memperlihatkan komitmen dalam memastikan ketersediaan dan penyaluran cadangan pangan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di tingkat desa, aparat dan kelompok masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan pangan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Pelaksana kebijakan menunjukkan sensitivitas sosial yang tinggi terhadap kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penderita gizi buruk, balita stunting, serta korban bencana alam. Pendekatan yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan lebih menekankan pada aspek kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata pada formalitas prosedur administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya didasari oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pelaksanaan CPPD di Kabupaten Bangli telah menginternalisasi prinsip *equity and social justice* dalam kebijakan publik, di mana keadilan dan pemerataan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program.

Selain komitmen individu, dukungan politik dari unsur eksekutif dan legislatif turut menjadi faktor penting yang memperkuat disposisi pelaksana kebijakan. Pemerintah daerah, melalui kepemimpinan kepala daerah dan dukungan DPRD Kabupaten Bangli, memberikan perhatian yang serius terhadap keberlanjutan program CPPD. Hal ini tercermin dari komitmen untuk menjadikan kebijakan cadangan pangan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah serta memastikan alokasi anggaran yang memadai setiap tahunnya. Dukungan politik tersebut tidak hanya memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menciptakan iklim birokrasi yang kondusif bagi aparatur pelaksana untuk bekerja dengan motivasi tinggi. Dengan adanya jaminan politik dan kebijakan anggaran yang konsisten, pelaksana di lapangan memiliki keyakinan bahwa upaya mereka didukung secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Kehadiran dukungan politik ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan instansi seperti BPBD, Dinas Sosial, Bappeda, serta unsur TNI dan Polri, yang berperan dalam aspek keamanan dan kelancaran distribusi pangan. Sinergi antarinstansi ini menumbuhkan rasa solidaritas kelembagaan dan memperkokoh semangat kolektif dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dukungan lintas sektor tersebut juga memperlihatkan bahwa disposisi pelaksana tidak berdiri sendiri, melainkan terbangun melalui interaksi antara komitmen individual dan struktur kelembagaan yang mendukung terciptanya pelaksanaan kebijakan yang efisien dan berkeadilan.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor disposisi masih memerlukan penguatan dalam beberapa aspek, terutama dalam hal motivasi non-material bagi pelaksana di tingkat lapangan. Meskipun semangat

kerja dan tanggung jawab mereka tinggi, keterbatasan insentif dan penghargaan terhadap kinerja aparatur dapat berpotensi menurunkan motivasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen kinerja yang lebih terstruktur, seperti pemberian penghargaan (*reward system*) bagi pelaksana yang berprestasi, serta pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat etos kerja dan kompetensi teknis.

Faktor disposisi pelaksana kebijakan dalam implementasi program CPPD di Kabupaten Bangli dapat dikategorikan sangat baik. Pelaksana kebijakan menunjukkan sikap profesional, komitmen yang tinggi terhadap tujuan kebijakan, serta kepedulian sosial yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Dukungan politik dari eksekutif dan legislatif semakin memperkuat motivasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam perspektif teoretis Edward III, kondisi ini menggambarkan bahwa sikap pelaksana yang positif dan komitmen yang kuat merupakan prasyarat utama dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, disposisi pelaksana yang kuat di Kabupaten Bangli menjadi salah satu faktor determinan dalam memastikan keberhasilan kebijakan cadangan pangan sebagai bagian integral dari sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

#### 4.1.4 Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi merupakan salah satu komponen penting dalam model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III. Struktur birokrasi menentukan bagaimana kebijakan diorganisasikan, dikoordinasikan, dan dijalankan secara operasional oleh berbagai aktor pelaksana. Dalam konteks implementasi kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bangli, hasil penelitian menunjukkan

bahwa struktur birokrasi yang terbentuk tergolong terorganisir, adaptif, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kejelasan struktur ini menjadi landasan utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi.

Pelaksanaan CPPD di Kabupaten Bangli berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, serta diperkuat dengan ketentuan teknis dari Peraturan Gubernur Bali yang mengatur mekanisme koordinasi dan pelaporan kebijakan pangan di tingkat daerah. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pelaksanaan kebijakan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dijalankan secara sistematis sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Struktur birokrasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja lintas sektor yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan CPPD.

Salah satu bentuk konkret dari struktur birokrasi yang efektif adalah keberadaan tim lintas sektor CPPD Kabupaten Bangli. Tim ini terdiri atas unsur pemerintah daerah dan lembaga pendukung, antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Polres, serta Kodim 1626/Bangli. Setiap unsur dalam tim memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam keseluruhan tahapan implementasi kebijakan. Misalnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bertanggung jawab terhadap pengelolaan stok dan logistik pangan; BPBD dan Dinas Sosial berperan dalam identifikasi dan verifikasi masyarakat terdampak; sedangkan Kodim dan Polres memberikan dukungan keamanan dan ketertiban selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan

adanya praktik birokrasi kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan kerja sama antarinstansi untuk mencapai tujuan kebijakan secara efisien dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, struktur birokrasi CPPD di Kabupaten Bangli bersifat hierarkis namun adaptif. Artinya, meskipun terdapat alur komando yang jelas dari tingkat kabupaten ke desa, setiap instansi diberi ruang fleksibilitas dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi lapangan. Fleksibilitas ini tampak dalam mekanisme pengumpulan data, verifikasi penerima manfaat, penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan, serta distribusi cadangan pangan ke wilayah terdampak. Proses koordinasi dilakukan secara berjenjang melalui rapat teknis dan evaluasi berkala, sehingga memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan.

Mekanisme birokrasi yang diterapkan juga menunjukkan keseimbangan antara akuntabilitas dan efisiensi. Di satu sisi, prosedur administratif tetap dijalankan untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya publik; di sisi lain, sistem birokrasi yang fleksibel memungkinkan pelaksana di lapangan untuk mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat, seperti ketika terjadi bencana alam yang membutuhkan penyaluran bantuan pangan segera. Pendekatan ini menunjukkan adanya responsivitas birokrasi, di mana struktur organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.

Beberapa tantangan teknis yang masih dihadapi dalam pelaksanaan struktur birokrasi CPPD di Kabupaten Bangli, khususnya dalam hal pemilihan penyedia beras. Proses pengadaan bahan pangan

kadang mengalami keterlambatan akibat perbedaan persepsi terkait mekanisme yang paling efisien antara penggunaan sistem e-katalog dengan mekanisme kerja sama langsung (*penunjukan langsung*). Keterlambatan ini berpotensi memengaruhi kecepatan penyaluran cadangan pangan, terutama dalam kondisi yang memerlukan penanganan cepat. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan prosedur pengadaan melalui penyesuaian regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur agar proses pengadaan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip *value for money*.

Selain itu, aspek koordinasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar tidak terjadi duplikasi tugas dan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi terintegrasi antar dinas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi birokrasi, khususnya dalam hal pelaporan stok, distribusi, dan pelacakan penerima bantuan. Upaya digitalisasi birokrasi ini juga akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi yang menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas implementasi kebijakan CPPD.

Struktur birokrasi pelaksanaan CPPD di Kabupaten Bangli dapat dikategorikan efektif, adaptif, dan akuntabel, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan teknis untuk meningkatkannya. Kejelasan dasar hukum, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta fleksibilitas dalam pelaksanaan menunjukkan bahwa struktur birokrasi di Kabupaten Bangli telah berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik yang ideal. Dalam perspektif teori Edward III, keberadaan struktur birokrasi yang jelas, responsif, dan efisien merupakan syarat utama dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan terus memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperbaiki mekanisme koordinasi,

kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli berpotensi menjadi model tata kelola pangan daerah yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan..

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan kebijakan cadangan pangan di Kabupaten Bangli menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Sinergitas dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi membentuk kapasitas implementasi yang konvergen, adaptif, serta berorientasi pada penguatan ketahanan pangan daerah.

Komunikasi kebijakan berlangsung transformatif melalui sosialisasi berjenjang, koordinasi lintas sektor, serta diseminasi informasi yang konsisten sehingga menghasilkan keseragaman pemahaman pelaksana dan kelompok sasaran. Dukungan sumber daya mencerminkan kesiapan institusional yang memadai, ditunjukkan oleh kompetensi aparatur, kecukupan anggaran, serta dukungan infrastruktur logistik Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Disposisi pelaksana memperlihatkan komitmen normatif dan profesionalitas birokrasi yang selaras dengan agenda perlindungan kerawanan pangan masyarakat. Struktur birokrasi yang terlembagakan, akuntabel, dan kolaboratif memperkuat efektivitas koordinasi antarperangkat daerah dalam situasi normal maupun kedaruratan pangan.

Efektivitas implementasi tersebut merefleksikan praktik tata kelola pangan publik yang responsif dan berkelanjutan. Penguatan ke depan menuntut akselerasi digitalisasi sistem distribusi dan pelaporan, integrasi data pangan daerah, inovasi tata niaga cadangan pangan, serta konsistensi dukungan fiskal sebagai prasyarat keberlanjutan kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Kabupaten Bangli dengan menggunakan model George C. Edward III, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan, baik pada tataran teknis maupun kelembagaan.

1. Penguatan Sistem Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah daerah perlu memperluas jangkauan komunikasi kebijakan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis teknologi informasi. Sosialisasi tidak hanya difokuskan kepada aparatur desa, tetapi juga kepada masyarakat penerima manfaat dan kelompok rentan melalui media digital, forum musyawarah desa, serta pendampingan lapangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap tujuan, mekanisme, dan manfaat CPPD dapat semakin merata dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan maupun pelaksanaan kebijakan.
2. Optimalisasi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Untuk memperkuat kapasitas pelaksana kebijakan, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait manajemen cadangan pangan, sistem logistik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah daerah juga disarankan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen cadangan pangan (SIM-CPPD) berbasis digital guna mendukung transparansi data, mempermudah koordinasi lintas sektor, serta

- mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan.
3. **Konsistensi dan Keberlanjutan Pendanaan**  
Alokasi anggaran perlu direncanakan secara berkelanjutan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah dapat menjajaki kerja sama pendanaan dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memperkuat cadangan pangan. Selain itu, diperlukan pengawasan keuangan yang transparan dan akuntabel agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
  4. **Perbaikan Mekanisme Pengadaan dan Distribusi**  
Proses pengadaan bahan pangan, khususnya beras, perlu disempurnakan melalui penerapan sistem *e-catalogue* daerah dan peningkatan kerja sama dengan Bulog, koperasi tani, serta kelompok tani lokal. Dari sisi distribusi, pemerintah daerah disarankan mengembangkan model distribusi berbasis wilayah yang mempertimbangkan kondisi geografis pegunungan di Bangli, agar penyaluran bantuan dapat lebih cepat dan tepat sasaran, terutama saat terjadi bencana atau krisis pangan.
  5. **Penguatan Struktur dan Koordinasi Birokrasi Lintas Sektor**  
Diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi permanen antarinstansi dalam bentuk forum ketahanan pangan daerah yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta aparat keamanan. Forum ini berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan, menyusun strategi mitigasi risiko kerawanan pangan, dan memastikan adanya respons cepat terhadap situasi darurat.
  6. **Monitoring, Evaluasi, dan Inovasi Kebijakan**  
Pemerintah daerah perlu menetapkan sistem monitoring dan evaluasi (monev) berbasis indikator kinerja yang jelas, meliputi efektivitas distribusi, ketepatan sasaran, serta dampak terhadap pengurangan kerawanan pangan. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan inovasi kebijakan di masa mendatang, seperti pengembangan cadangan pangan berbasis komoditas lokal dan pemanfaatan gudang pangan desa (*village food barn*).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A IMS, Sawitri Dj W, Bagus Dera Setiawan IG. Konversi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Bali. *J Ekon Pertan dan Agribisnis*. 2024;8(1):113.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Abida, D., Ramadhan, N. A., Hafizh, M., & Rohma, D. (2025). Tingkat diversifikasi pengeluaran pangan rumah tangga di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(2), 120–129. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2025.005.02.5>
- Alderman, H. (2016). Leveraging social protection programs for improved nutrition. *World Bank Research Observer*, 31(2), 139–165. <https://doi.org/10.1093/wbro/lkw002>
- Braun, J. von, & Torero, M. (2009). Implementing physical and virtual

- food reserves to protect the poor. *IFPRI Policy Brief*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.2499/9780896291662>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Eriksen, S., Bohle, H. G., & Stewart, B. (2010). Vulnerability and resilience in food systems. *Global Environmental Change*, 20(3), 523–535. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.02.002>
- FAO. (2019). *The state of food security and nutrition in the world*. Food and Agriculture Organization.
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi kebijakan dan realisasi rencana tata ruang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.1793>
- Headey, D., & Fan, S. (2008). Anatomy of a crisis: The causes and consequences of surging food prices. *Agricultural Economics*, 39(S1), 375–391. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00345.x>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman.
- Mertada, K. S. (2021). Efektivitas kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 99–118. <https://doi.org/10.24843/JIH.2021.v09.i01.p05>
- Mouwn, E. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rake Sarasin.
- Nugroho, R. (2017). Public policy implementation in Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 21(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jkap.25345>
- Permini, N. L. P. E., & Junaedi, I. K. D. (2023). Implementasi program Teman Bus dalam pengembangan transportasi publik. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(4), 230–239. <https://doi.org/10.58684/jrdpp.v2i4.115>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- Rachmayani, A. N. (2015). Evaluasi program pekarangan pangan lestari di Kabupaten Bangli. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.29244/jai.2015.6.1.1-10>
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X0003846>
- Sipayung, R. (2019). Implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 5–19. <https://doi.org/10.31289/jap.v5i1.2456>
- Sobari, W. (2020). *Metode penelitian kebijakan berbasis ilmu sosial*. UB Press.
- Sri, M. (2020). Dampak pembangunan infrastruktur terhadap ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 26(3), 421–438. <https://doi.org/10.23917/jep.v26i3.10512>
- Suarni, N. W. (2022). Analisis ketersediaan dan kebutuhan beras di Provinsi Bali. *Jurnal Agrimeta*, 10(8), 588–599. <https://doi.org/10.24843/agrimeta.2022.v10.i08.p07>
- Swinnen, J., & Squicciarini, P. (2012). Mixed messages on prices and food security. *Science*, 335(6067), 405–406. <https://doi.org/10.1126/science.1210806>

- Wahyuni, M. A., Kariada, K., & Darmawati, A. A. I. M. (2021). Analisis distribusi pasar dan margin pemasaran gabah-beras dalam ketahanan pangan di Bali. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata*, 9(2), 477–489. <https://doi.org/10.24843/JAA.2021.v09.i02.p15>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- World Bank. (2020). Food security and COVID-19. *World Bank Policy Report*. <https://doi.org/10.1596/33582>
- Zahariadis, N. (2014). Ambiguity and multiple streams. *Public Administration Review*, 74(1), 25–36. <https://doi.org/10.1111/puar.12178>